

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional diarahkan kepada pembangunan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang dimulai dari pembangunan pada setiap aspek kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia mendambakan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Pencapaian cita-cita itu adalah berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sedangkan usaha-usaha untuk merealisasi cita-cita tersebut ditetapkan melalui Garis garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Gambaran mengenai masyarakat makmur adalah masyarakat yang serba kecukupan. Apabila kecukupan itu merata bagi seluruh rakyatnya maka keadaan tersebut dikatakan adil. Dengan demikian masyarakat adil dan makmur adalah masyarakat yang serba kecukupan serta merata bagi seluruh rakyat, kecukupan itu tidak hanya bagi golongan orang saja, ditetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 (GBHN : 96)

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya; bahwa pembangunan itu merata di seluruh Tanah Air; bahwa bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh

masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh Rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita.

Kepadatan penduduk mempunyai kaitan erat dengan tersedianya lapangan kerja, yang berarti menuntut adanya perluasan lapangan kerja (Ismail. 1983 : 32). Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang sedang berkembang yang merupakan negara kelima yang terpadat penduduknya. Oleh sebab itu pemerintah selalu berusaha mencari jalan agar semua orang yang hidup di bumi Indonesia dapat hidup aman, tentram, cukup pangan, papan dan sandang. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah melalui tahapan-tahapan pembangunan.

Présiden Soeharto (1984 : 64) mengatakan bahwa pembangunan suatu bangsa akan berhasil jika bangsa itu berhasil membangun sumber daya manusianya.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diartikan bahwa yang menjadi andalan utama keberhasilan suatu pembangunan nasional bukan hanya kekayaan alam yang melimpah, melainkan kualitas manusia Indonesia adalah merupakan faktor utama dalam menentukan berhasilnya suatu pembangunan. Tujuan dan arah daripada pembangunan terkandung suatu usaha membangun manusia-manusia pembangunan yang menyadari akan perlunya membangun hari esok yang lebih baik dari hari ini, rasa percaya diri serta mempunyai kemampuan untuk memperbaiki pada setiap aspek kehidupannya.

Sasaran pokok yang hendak dicapai dalam pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi adalah struktur ekonomi yang seimbang dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri maju didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh. Dengan prinsip bahwa Repelita terdahulu mempunyai sasaran untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat banyak serta untuk menciptakan landasan pada Repelita berikutnya, struktur ekonomi yang seimbang itu akan dicapai secara bertahap melalui Repelita repelita sebagai berikut (GBHN, 1983 : 404).

Repelita I : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian.

Repelita II : meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

Repelita III : meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Repelita IV : meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan yang terus dikembangkan dalam Repelita repelita berikutnya.

Dengan meningkatkan bidang industri dan pertanian secara bertahap seperti tersebut diatas, diharapkan akan terpenuhilah kebutuhan pokok rakyat dan akan tercapailah struktur ekonomi yang seimbang, yang setelah melampaui Pembangunan Lima Tahun yang Kelima atau yang Keenam, akan tercapailah landasan bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Salah satu masalah yang dapat dianggap menghambat pembangunan di Indonesia adalah masalah pengangguran, ini antara lain disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, sedangkan jumlah pencari kerja sangat banyak.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dan kelemahan dalam pendidikan formal, karena belum cocoknya sistem pendidikan dengan pembangunan yang dilaksanakan, maka banyak tenaga kerja yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan sebab tidak memenuhi persyaratan.
3. Keadaan sosial budaya suatu masyarakat misalnya banyak pemuda dari desa ke kota bukan ingin mencari pekerjaan, namun karena kakaknya sudah berkecukupan sehingga pemuda tersebut numpang saja yang akhirnya menjadi beban keluarga tersebut (R.H.Pardoko, 1983 : 10).

Berdasarkan pada sensus penduduk tahun 1980, angka pengangguran yang terdaftar adalah terlihat sebanyak 4.531.777 jiwa dari populasi angkatan kerja tahun 1980 yang berjumlah 52.109.926 jiwa (8,7 %), sedangkan komposisi pengangguran dijabarkan dalam tingkatan pendidikan adalah sebagai berikut : tamatan SD 88,2%, SLTP /SLTA 11,0% dan tamatan Akademi/Perguruan Tinggi 0,8%. Dikemukakan kembali oleh (Ismail, 1983 : 10).

Terlihat bahwa tingkatan pengangguran masih cukup tinggi, disebabkan untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan tidak mudah.

Dalam hal ini pemerintah menganjurkan agar pemuda tidak hanya mengejar pekerjaan sebagai pegawai negeri, karena kesempatan menjadi pegawai negeri sangat terbatas. Carilah lapangan pekerjaan di luar pegawai negeri, yaitu wiraswasta, sebab wiraswasta jauh lebih terbuka kesempatan bila dibanding sebagai pegawai negeri (Ismail, 1983 : 11)

Masalah pengangguran perlu sesegera mungkin ditangani, karena dalam situasi yang demikian akan menjadi salah satu penyebab tumbuhnya gelandangan, kelompok penjahat, pencurian dan sejenisnya, sehingga akhirnya timbul rasa tidak puas terhadap pemerintah, bahkan menuduh pemerintah tidak adil dan tidak memperdulikan rakyat banyak (Haryono Suyono, 1983 : 12). Untuk itu salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam Pelita III antara lain mengutamakan berbagai proyek kegiatan pembangunan yang ditujukan guna meningkatkan lapangan kerja dan memperluas lapangan kerja. Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pembangunan tenaga kerja adalah bersifat menyeluruh dan sektoral, disebabkan tenaga kerja adalah unsur utama dalam segala bidang pembangunan. Dalam TAP/MPR-RI No. II/MPR/1983 (GBHN :83), dinyatakan sebagai berikut :

Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok di semua sektor. Dalam hal ini program-program pembangunan sektoral dan regional selalu mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin. Kebijaksanaan tenaga kerja juga diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemamfaatan tenaga kerja yang lebih

baik dengan jalan pembinaan dan peningkatan keterampilan terutama bagi angkatan kerja usia muda.

Usaha untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja bagi angkatan kerja serta meningkatkan mutu dan perlindungan tenaga kerja, penyebaran tenaga kerja, maka keluarga, masyarakat dan pemerintah dituntut tanggung jawabnya. Dalam TAP/MPR/1983 (GBHN : 94), dinyatakan :

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan disegala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta sekaligus meningkatkan produktivitas, kreativitas dan mutu serta efisiensi kerja.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak, sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang.

Coombs & Manzoor Ahmed (1984 : 29), menyatakan bahwa ketimpangan yang amat gawat dalam persekolahan dasar sangat banyak memberatkan tugas pendidikan non-formal, yang sekarang bukan hanya harus melengkapi pendidikan dasar melainkan juga harus mengisi kekosongan akibat defisit pada persekolahan formal. Pendidikan non-formal mempunyai tugas untuk melengkapi pendidikan dasar juga diberatkan untuk mengisi kekosongan-kekosongan akibat defisit pada pendidikan formal serta diharuskan . . .

untuk cukup jeli dalam menyesuaikan pengetahuan-pengetahuan yang akan diberikan dengan pemenuhan kebutuhan pembangunan disegala bidang yang memerlukan berbagai jenis keahlian dan keterampilan yang dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas dan efisiensi kerja.

Pendidikan Nasional akan berhasil menurut Santoso S. Hamijoyo (1982 : 28), apabila :

Program pendidikan termasuk pendidikan non-formal disusun sedemikian efisien dan efektifnya, sehingga dapat melahirkan manusia baru yang memiliki kualitas di atas secara dinamis, dalam arti mampu mengembangkan dirinya di dalam masyarakat yang selalu berubah. Secara nasional terdapat dan dijamin keselarasan antara sikap dan nilai-nilai yang dikembangkan di lingkungan sistem pendidikan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat luas sebagai konteks lingkungan pendidikan dan kebudayaan pada umumnya.

Penjelasan di atas menekankan bahwa pendidikan non-formal merupakan bagian dari pendidikan nasional yang ikut memberikan perannya. Berdasarkan pengamatan sementara yang pernah dilakukan, masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke-tingkat pendidikan berikutnya, begitu pula dalam memperoleh pekerjaan cukup sulit, karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah diikuti pula oleh lapangan lapangan kerja yang sangat terbatas.

Pada tabel berikut terlihat dengan jelas jumlah murid dan putus sekolah tahun 1982 - 1983.

TABEL 1
JUMLAH MURID DAN PUTUS SEKOLAH
1982 - 1983

| Tingkat Sekolah | Jumlah Murid | Putus Sekolah | Prosentase |
|-----------------|--------------|---------------|------------|
| SD. | 25.140.000 | 755.900 | 3,01 % |
| SLTP. | 4.489.000 | 176.900 | 3,94 % |
| SLTA. | 2.256.500 | 138.500 | 6,14 % |
| Jumlah | 31.885.500 | 1.071.300 | 3,36 % |

Sumber data : BP3K Departemen P & K.

Data dalam tabel 1 di atas menunjukkan jumlah murid dan putus sekolah memberikan indikasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil jumlah murid yang dapat melanjutkan dan semakin besar murid atau anak-anak putus sekolah. Seyogianya pelaksanaan pembangunan menuntut adanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan, kecakapan dalam berbagai segi kegiatan, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Untuk memenuhi tuntutan di atas, diperlukan berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Melalui penanganan pemberian keterampilan, diharapkan dapat ditransfer dalam kehidupan untuk memperoleh kesempatan kerja dan ikut serta aktif dalam pembangunan.

Penemuan ladang gas alam oleh Mobil Oil Indonesia (MOI) di lokasi Arun, Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1971, yang mempunyai cadangan sebesar 17 triliun SCF (Standar Cubic Feet), telah mengantarkan daerah Aceh Utara menjadi suatu daerah industri dengan perkembangannya yang sangat cepat. Penemuan ladang gas alam tersebut diikuti oleh pembangunan industri pencairan gas alam PT. Arun (PTA) pada tahun 1975, berproduksi pada tahun 1978. Dengan adanya industri pencairan gas alam PT Arun diikuti pula oleh pembangunan industri kaitan lainnya seperti pembangunan pabrik pupuk urea PT. Asean Aceh Fertilizer (PT.AAF) pada tahun 1981, berproduksi pada tahun 1983, pembangunan pabrik pupuk urea PT. Pupuk Iskandar Muda (PT.PIM) tahun 1982, berproduksi pada tahun 1984. Kesemuanya itu adalah merupakan tahapan Repelita yang telah dicanangkan pemerintah dan terbukti dengan dibangunnya berbagai industri berskala besar. Bagi bangsa Indonesia berdirinya pabrik pencairan gas alam PT. Arun yang kemudian diikuti oleh dibangunnya industri-industri besar yang mempunyai kaitan seperti PT. Asean Aceh Fertilizer dan PT. Pupuk Iskandar Muda, kedua-duanya memproduksi Pupuk Urea akan memberi manfaat dalam memenuhi kebutuhan akan pupuk pada sektor pertanian diikuti pula akan terbukanya kesempatan kerja bagi angkatan kerja.

Adanya industri berskala besar di wilayah kota Administratif Lhokseumawe tidak dapat pula kita kesampingkan bahwa industri berskala besar dengan penggunaan teknologi canggih memerlukan tenaga kerja yang terampil untuk mengelolanya, dengan kata lain memerlukan tenaga-tenaga skil dalam menangani setiap komponen industri.

Industri membutuhkan ruang, areal pabrik, perumahan, karyawan, transportasi, fasilitas, akomodasi, rumah sakit, tempat ibadah, lapangan olah raga, tempat rekreasi, shopping center dan cukup banyak lagi kebutuhan industri yang tentu saja akan tertumpang di lingkungan masyarakat dimana lokasi industri didirikan yang mau tidak mau akan terlibat ke dalam pergeseran-pergeseran yang mengharuskan partisipasi tinggi. Kehadiran industri-industri berskala besar ini telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang cukup drastis dalam kehidupan masyarakat di Kota Administratif Lhokseumawe. Emil Salim (1979 : 1), menyatakan bahwa Pendirian industri, disamping melibatkan pengadaan, sekaligus pemeliharaan fisik konstruksi, personil, medannya, komunikasi, pemasaran, sarana, keamanan, juga dampaknya terhadap dunia sekitar, selanjutnya Emil Salim, soal lingkungan hidup, pemukiman, tata guna tanah, migrasi, kepadatan penduduk, penyediaan air minum, pelayanan umum, pembuangan

tinja dan sampah, pencemaran air dan udara (seperti dari asap industri, kendaraan bermotor), maupun kesehatan lingkungan.

Abdullah Ali (1985) mensinyalir, kehadiran industri LNG (Liquefaction Natural Gas) di daerah Aceh diibaratkan sebagai munculnya sebuah pulau mewah di tengah-tengah samudra kemiskinan (Bahren T. Sugihen, 1985 : 22). Menurut apa yang disinyalir Abdullah Ali, dapat kita pahami ditinjau dari keadaan fisik lokasi di mana industri-industri tersebut didirikan. Kawasan yang sebelum adanya industri adalah merupakan kawasan semak belukar beserta rawa-rawa yang di sana sini terlihat adanya tambak ikan penduduk setempat, dalam jangka waktu yang relatif singkat, hanya dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1975 menjadi kawasan industri yang mewah dan gemerlap dengan lampu-lampu mercurynya. Dewasa ini di kawasan industri terlihat adanya wajah ganda sebuah pemukiman, di satu pihak terlihat adanya kehidupan masyarakat setempat yang masih tetap bermata pencaharian hidup sebagai petani sawah atau tambak dengan areal pertanian yang semakin sempit terdesak oleh kebutuhan areal industri dengan pengelolaan dalam bentuk serba tradisional. Sedangkan di pihak lain terlihat pula perumahan karyawan industri dalam bentuk gaya hidup modern dan penuh kegemerlapan. Tanggapan masyarakat sekitar terhadap perumahan karyawan dan gaya

hidup karyawan industri adalah sebagai berikut (Wawancara, 1987), "bahwa mereka (karyawan industri) adalah orang-orang yang telah betul-betul merdeka, dalam nada yang sama bahwa orang-orang itu betul-betul memperoleh kesempatan mencicipi atau menikmati hasil kemerdekaan". Bila kita lihat sepintas lalu, tanggapan masyarakat sekitar terhadap perumahan karyawan dan gaya hidup karyawan industri sedikit menyentuh, seolah-olah hanya sebahagian atau segolongan saja daripada bangsa Indonesia yang dapat menikmati hasil kemerdekaan. Namun, apabila direnungkan lebih mendalam bahwa cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah menuju masyarakat adil dan makmur.

Seperti telah dialami oleh daerah-daerah lain di Indonesia, pemanfaatan daya alam melalui industri besar dengan teknologi maju dan canggih disamping dampak positif timbul juga dampak negatif. Menurut Djarot Djojokusumo (1985 : 2), dampak negatif yang umumnya dengan ciri-ciri yang sama antara lain :

1. Terjadinya urbanisasi tak terkendali yang dapat mengakibatkan pembangunan desa di daerah pertanian yang ditinggalkan penduduk dapat terganggu, sedangkan di daerah industri/kota dapat terjadi pengangguran dengan segala macam akibatnya antara lain peningkatan kriminalitas.
2. Kenaikan harga barang dan jasa yang harus dipikul masyarakat setempat.
3. Beban tambahan sektor pemerintahan seperti pelayanan umum dan administrasi, dukungan keamanan, biaya pemeliharaan prasarana yang mungkin menjadi lebih tinggi karena penggunaannya yang mungkin melebihi kapasitas oleh proyek-proyek.

4. Timbulnya enclave serta kesenjangan sosial ekonomi karena antara lain masyarakat tidak dapat menikmati manfaat langsung daripada kehadiran industri besar, yang umumnya padat modal serta memerlukan tenaga terampil dalam masa operasinya.

Hal serupa tentunya dialami pula oleh masyarakat serta pemerintah di Kota Administratif Lhokseumawe. Terlebih lagi keadaan masyarakat pada masa proyek LNG dimulai relatif belum siap dan belum cukup tangguh untuk menanggapi tantangan dan kesempatan yang timbul karena adanya kebutuhan proyek. Keadaan tersebut tentu akan membawa proyek dalam posisi dimana sebagian besar kebutuhan harus dilayani oleh pihak di luar masyarakat, Djarot Djokusumo (1985 : 3), sehingga peran serta secara langsung dari masyarakat sekitar industri sangat kurang, malah dapat dikatakan hanya bertindak sebagai penonton dalam pembangunan proyek.

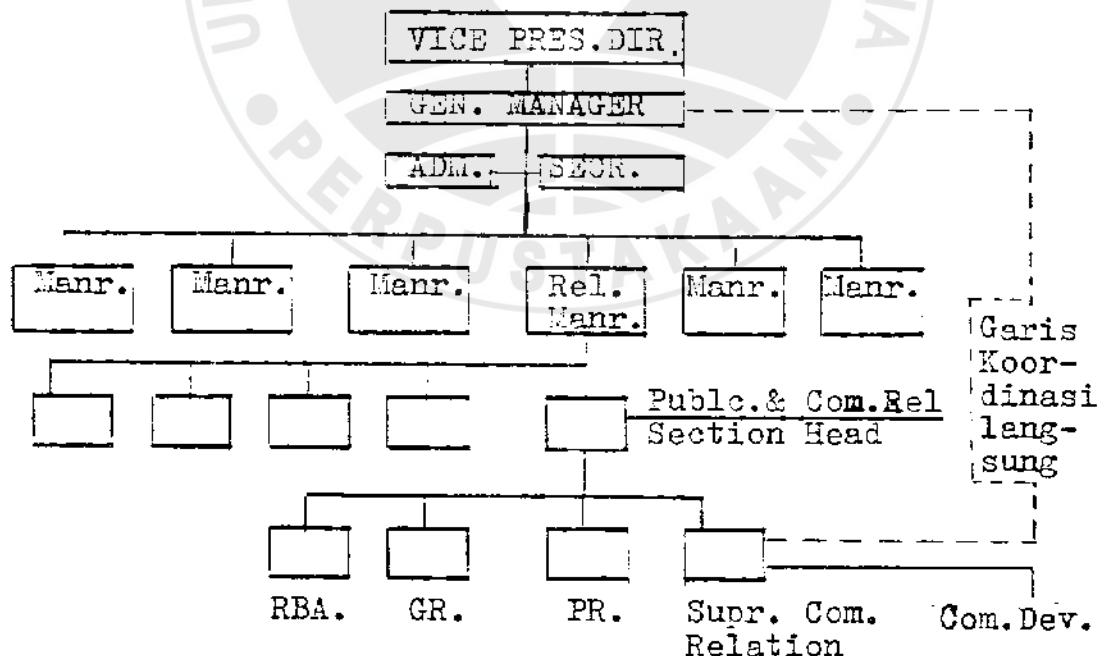
Di sisi lain Pemerintah dalam GBHN Pelita III, pada rincian 6 (delapan) jalur pemerataan menginginkan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud masyarakat adalah termasuk masyarakat yang berada di sekitar lokasi industri, sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden melalui Sambutan Presiden pada Konvensi Tahunan Indonesia Petroleum Association Ke XVI (1987 : 3), menyatakan :

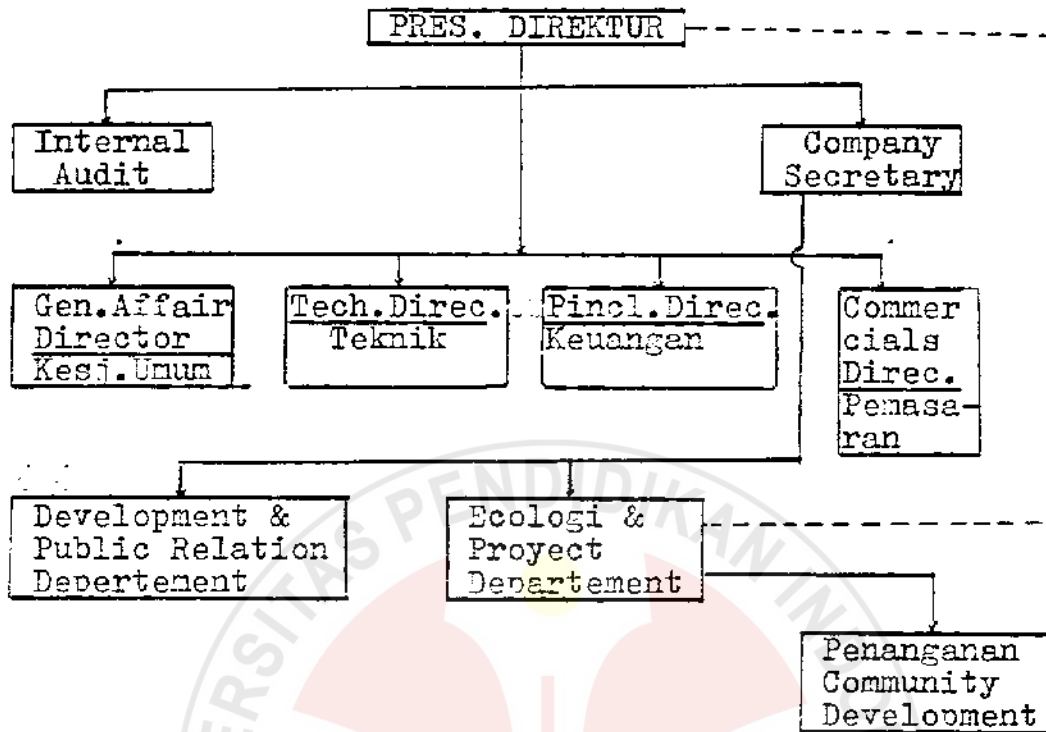
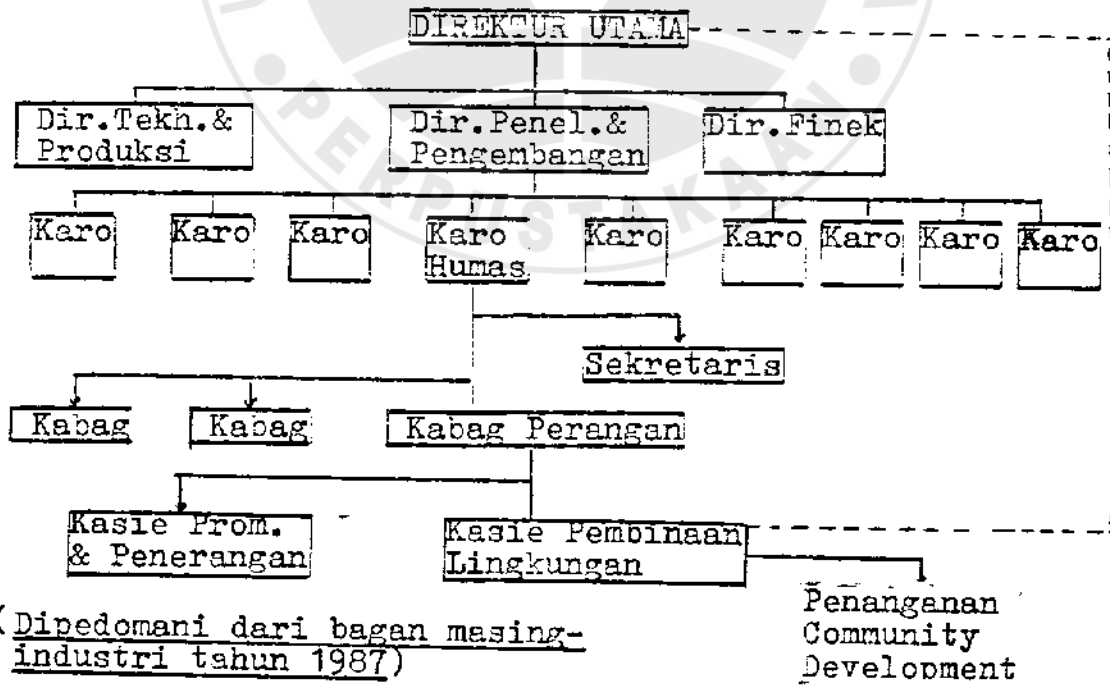
Dalam hubungan ini saya berharap agar industri minyak dan gas bumi dapat ikut mendukung pembangunan di wilayah tempat operasi dan lingkungannya, yang harus dapat mencerminkan pelaksanaan dari

Trilogi Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas nasional. Hal ini terutama sangat penting dalam rangka menghindari terjadinya kesenjangan sosial. Adalah adil dan wajar, jika masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah industri minyak dapat turut berperan dan turut menikmati perbaikan kehidupan dari industri yang berada di wilayahnya.

Industri berskala besar seperti PT.Arun, PT.AAF dan PT.PIM yang mempunyai sistem dan hirarki struktur manajemen yang saling berbeda, baik rangkaian kegiatan produksi, administrasi, teknis, pemasaran maupun komunikasi, namun ada kesamaannya yaitu memiliki program community development yang terkait dengan sistem perusahaan, walaupun tempatnya dalam struktur organisasi berbeda-beda, dapat dilihat di dalam bagan sebagai berikut :

a. PT. ARUN LNG



b. PT. ASEAN ACEH FERTILIZERc. PT. PUPUK ISKANDAR MUDA

Dalam manajemen industri terlihat adanya unit-unit yang menangani Community Development. PT. Arun meletakkan Community Development sebagai salah satu bagian tugas dari Community Development Departement, berada pada jenjang ke 6 (enam) di bawah Vice President Director, yang mempunyai garis koordinasi langsung dengan General Manager. Pada PT.AAF, Community Development ditempatkan sebagai salah satu bidang tugas pada Ecologi & Proyect Departement berada pada jenjang ke 3 (tiga) di bawah Presiden Direktur yang mempunyai garis koordinasi langsung dengan Presiden Direktur. Sedangkan PT. PIM, Community Development ditempatkan pada Seksi Pembinaan Lingkungan, berada pada jenjang ke 5 (lima) di bawah Direktur Utama dan mempunyai garis koordinasi langsung dengan Direktur Utama. Community Development di PT. Arun dan PT. PIM bersifat program, sedangkan di PT. AAF berstruktur langsung.

Disamping itu ada lagi badan-badan non-struktural dari warga industri. Disamping bergerak untuk keperluan intern mereka, juga mempunyai program Community Development. PT. Arun memiliki Dharma Wanita, Woman International Club, Remaja Mesjid dan Badan Dakwah Islamiyah (BDI). PT. AAF juga memiliki Dharma Wanita, Remaja Mesjid dan Badan Dakwah Islamiyah (BDI). Sedangkan PT. PIM Community Development didukung oleh

Pengurus Mesjid, Ikatan Remaja PIM (IRPIM) dan Dharma Wanita.

Sehubungan dengan adanya industri-industri tersebut tidak dapat pula kita kesampingkan bahwa industri berskala besar yang menggunakan teknologi canggih memerlukan tenaga kerja yang terampil untuk mengelolanya. Selain daripada itu juga dampak industri tersebut bagi penduduk, khususnya penduduk yang berada disekitar lokasi proyek industri didirikan, apabila penduduk yang berada disekitar lokasi industri, mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, tentu saja tidak memungkinkan mereka ditampung sebagai tenaga kerja pada industri, walaupun pemerintah menyarankan agar industri mengutamakan putra daerah untuk dipakai sebagai tenaga kerja pada industri. Untuk mengurangi adanya kesenjangan antara penduduk yang berada disekitar lokasi dengan karyawan industri, pada hematnya diperlukan pemberian kesempatan untuk mendapatkan pendidikan serta penambahan pengetahuan dan keterampilan agar dapat meningkatkan kehidupannya sehingga lebih layak untuk hidup berdampingan dengan saudara-saudaranya yang telah mendapat kesempatan bekerja pada industri berskala besar.

Apabila kita berbicara masalah pendidikan masyarakat atau pendidikan orang dewasa, kita tidak lagi berada dalam pendidikan formal, melainkan kita harus mengalihkan perhatian kita kepada pendidikan non-formal

(pendidikan luar sekolah).

Coombs (1985 :10), menyatakan bahwa :

Pendidikan formal adalah "sistem pendidikan" yang sangat dilembagakan, bertahap kronologis dan bertata tingkat, mulai dari sekolah dasar sampai pada tingkat-tingkat tertinggi pendidikan universitas.

Pendidikan non-formal adalah pendidikan untuk menyebut kegiatan berorganisasi dan sistimatis, yang berlangsung di luar kerangka sistem pendidikan formal untuk menyediakan aneka ragam pelajaran tertentu kepada kelompok-kelompok penduduk tertentu, baik dari golongan dewasa maupun remaja.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Coombs di atas jelas bagi kita perbedaan antara pendidikan formal dengan pendidikan non-formal.

Selanjutnya Coombs (1985 : 378-379) :

Pendidikan non-formal itu dapat mengandalkan aneka ragam sponsor dan sumber dana atau dukungan, dan dapat diadakan dengan aneka corak dan bentuk, menggunakan aneka-ragam tenaga pengajar dan metodik pengajaran, dapat diselenggarakan pada sembarang waktu di sembarang tempat dan untuk setiap jangka-masa. Pendek kata, ia dapat diselenggarakan secara pragmatis.

Ternyata menurut Coombs bahwa pendidikan luar sekolah itu dapat mengandalkan aneka-ragam sponsor dan sumber dana atau dukungan, dapat diadakan dengan aneka corak dan bentuk, menggunakan aneka-ragam tenaga pengajar dan metodik pengajaran, dapat diselenggarakan pada sembarang waktu di sembarang tempat dan untuk setiap jangka-masa.

Apabila pendidikan dihubungkan dengan proses peningkatan taraf hidup, maka pendidikan adalah umpama

usaha yang dilakukan guna meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat kepada usaha-usaha perbaikan taraf hidup ketingkat yang lebih baik. Pada tahap proses penyadaran, peranan pendidikan luar sekolah cukup penting artinya, pendidikan luar sekolah dapat dijadikan sarana untuk membantu pengalihan berbagai pengetahuan keterampilan. De Jong (1984 : 66), mengemukakan dua fungsi utama pendidikan yaitu fungsi adaptif dan fungsi sosialisasi. Fungsi adaptif pendidikan berkenaan dengan peranan yang diberikan dalam mendukung usaha-usaha yang dilakukan guna mencapai kemajuan di bidang ekonomi suatu masyarakat. Sedangkan fungsi sosialisasi pendidikan berhubungan dengan pembinaan pribadi individu ke arah yang dicitakan.

Apa yang telah dikemukakan de Jong diperkuat Achmad Sanusi (1986), menyatakan paling tidak pendidikan mempunyai dua fungsi utama, bila dikaitkan dengan pembangunan suatu masyarakat. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi adaptif dan fungsi alokatif. Fungsi adaptif pendidikan berkenaan dengan penyelenggaraan berbagai jenis program pendidikan yang memusatkan perhatiannya pada kebutuhan lingkungan. Tugas dari pada lembaga pendidikan adalah menghasilkan orang-orang menurut peranan masing-masing lingkungan. Oleh sebab itu pendidikan tidak mungkin melepaskan diri sebagai salah satu sub-sistem dalam hubungan dengan suatu sistem yang lebih luas.

Sedangkan fungsi alokatif pendidikan berhubungan dengan pembinaan individu dan masyarakat, suatu kemajuan yang dicapai oleh individu atau masyarakat tertentu merupakan pencerminan dari penyelenggaraan pendidikan individu atau masyarakat tersebut. Oleh sebab itu tingkatan serta jenis pendidikan yang diperoleh suatu masyarakat ikut mewarnai tarap kehidupan suatu masyarakat. Untuk itu tidak dapat dikesampingkan bahwa dalam penyelenggaraan suatu bentuk pendidikan fungsi adaptif pendidikan dan fungsi alokatif pendidikan adalah saling melengkapi dan sukar dipisahkan.

Daerah Istimewa Aceh, khususnya daerah Kabupaten Aceh Utara, lebih khusus lagi wilayah Kota Administratif Lhokseumawe adalah merupakan wilayah berdirinya berbagai industri berskala besar. Namun berdasarkan hasil sensus tahun 1974, dari 105 Kecamatan miskin di Daerah Istimewa Aceh, termasuk 22 dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara (96%), tercakup di dalamnya Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Dewantara.

Wilayah Kota Administratif Lhokseumawe telah berkembang menjadi kota industri yang dipadati oleh berbagai bangunan-bangunan raksasa disertai pembangunan kompleks-komplek perumahan karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keindahan, telah membedakan wilayah Kota Administratif Lhokseumawe dengan kota-kota lainnya

di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Adanya industri-industri tersebut berarti mendatangkan tenaga kerja atau tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tingkatan pendidikannya, diikuti pula pada ketiga industri berskala besar tersebut mempunyai program community development disertai badan-badan non-struktural dari warga industri selain bergerak untuk keperluan intern mereka, juga mempunyai program community development, maka diharapkan membawa dampak positif bagi penduduk yang berada disekitar lokasi industri. Namun bagaimana pengaruh industri yang mempunyai program community development terhadap tumbuhnya berbagai pendidikan luar sekolah khususnya belum diketahui. Pada masa sekarang ini di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe terlihat berkembangnya berbagai pendidikan luar sekolah, apakah industri-industri berskala besar yang ada di wilayah itu ikut memberikan sumbangan tenaga maupun dana atau sebagai sponsor untuk memberikan berbagai keterampilan ataupun dapat membangkitkan motivasi masyarakat untuk mendirikan berbagai program pendidikan luar sekolah maupun sebagai peserta dari pada program-program pendidikan luar sekolah guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang berada disekitar lokasi khususnya, belum mendapatkan gambaran yang jelas, untuk itu masih perlu diadakan suatu penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdirinya industri-industri berskala besar di suatu daerah seperti di Kota Administratif Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara dapat mendatangkan berbagai dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif antara lain terjadinya peningkatan pendapatan nasional, peningkatan pendapatan regional, peningkatan export/devisa, kesempatan kerja/pendapatan, peningkatan status daerah, sedangkan dampak negatif antara lain seperti terjadinya kesenjangan pendapatan, kesenjangan kesempatan kerja/usaha, konflik pemanfaatan sumber, pencemaran lingkungan, urbanisasi, perubahan nilai. Dari berbagai dampak positif maupun negatif akan timbul berbagai tantangan baru, seperti peningkatan stabilitas politik, pencegahan pencemaran lingkungan, peningkatan kesempatan kerja, tata ruang, koordinasi pembangunan, pelayanan yang lebih baik.

Pengaruh langsung dari adanya industri-industri berskala besar akan sangat dirasakan oleh masyarakat dimana industri didirikan. Pengaruh langsung tersebut disebabkan industri membutuhkan ruang seperti areal pabrik, perumahan karyawan, transportasi, fasilitas, akomodasi, rumah sakit, tempat ibadah, lapangan olahraga, tempat rekreasi, shopping center dan cukup banyak lagi kebutuhan industri yang tentu saja akan tertumpang di lingkungan masyarakat dimana lokasi industri didirikan

yang mau tidak mau akan terlibat ke dalam pergeseran-pergeseran yang mengharuskan partisipasi tinggi. Kehadiran industri-industri berskala besar telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang cukup drastis dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan apa yang dikemukakan Schneider (1986 : 2), bahwa : Industri mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung, kadang-kadang bersifat drastis pada lembaga-lembaga lain dalam masyarakat.

Hilangnya lapangan pekerjaan sebagian penduduk petani tradisional. Adanya dana ganti rugi atas lahan yang mereka lepaskan untuk areal pembangunan industri tidak banyak membantu mereka untuk mendapatkan mata pencaharian baru. Usaha-usaha mereka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan bahkan dengan dukungan pemerintah daerah yang menyarankan kepada industri agar ikut memikirkan lapangan pekerjaan bagi mereka dengan menghimbau agar 60 pCt karyawan industri adalah merupakan putra daerah, menghadapi berbagai hambatan diantaranya tingkat pendidikan dan keterampilan mereka tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan industri, dengan kata lain tingkat pendidikan putra daerah rendah.

Pendidikan luar sekolah adalah merupakan salah satu sarana pendidikan yang dapat diadakan disembarang tempat, disembarang waktu dengan aneka ragam program dan sponsor akan dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan

berbagai keterampilan guna meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga tercapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Reimer (1973) seperti diungkapkan kembali De Jong (1984 : 104) menyatakan ...tak satu pun negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya akan pendidikan dalam bentuk sekolah saja.

Dewasa ini terlihat tumbuhnya berbagai jenis program pendidikan luar sekolah di wilayah kota administratif Lhokseumawe apakah ada hubungannya dengan adanya industri-industri berskala besar di wilayah tersebut ?

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan dipelajari dalam penelitian studi kasus ini dirumuskan sebagai berikut : "Bagaimana pengaruh industri berskala besar terhadap pendidikan luar sekolah?"

Dengan sub-sub masalah penelitian sebagai berikut:

1. Berapa banyak jenis program pendidikan luar sekolah baik sebelum maupun sesudah adanya industri berskala di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe ?
2. Apakah ada hubungan antara tumbuhnya berbagai jenis program pendidikan luar sekolah dengan adanya industri berskala besar di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe ?
3. Apakah terjadi peningkatan kegiatan pendidikan luar sekolah dengan adanya industri berskala besar di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe ?

4. Apakah secara umum ada pengaruh langsung industri berskala besar terhadap pendidikan luar sekolah di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambaran yang obyektif terhadap keseimbangan antara pembangunan industri dengan pembangunan pendidikan bagi masyarakat yang berkaitan dengan penambahan pengetahuan dan membelajarkan warga masyarakat untuk memperoleh keterampilan melalui program-program pendidikan luar sekolah, guna memperoleh mata pencaharian sebagai sumber penghasilan yang layak, menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur serta tercapainya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini diarahkan untuk mempelajari beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Guna memperoleh data yang obyektif tentang berbagai jenis program pendidikan luar sekolah baik sebelum maupun sesudah adanya industri berskala besar di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe.

- b. Guna memperoleh data mengenai apakah ada hubungan antara tumbuhnya berbagai jenis program pendidikan luar sekolah dengan adanya industri berskala besar di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe.

c. Guna memperoleh data tentang apakah terjadi peningkatan kegiatan pendidikan luar sekolah dengan adanya industri berskala besar di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe.

d. Guna mempelajari apakah secara umum ada pengaruh langsung industri berskala besar terhadap pendidikan luar sekolah di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe.

D. Kegunaan Penelitian

Menurut Stephan dan William (1977), terdapat dua pertimbangan dalam menetapkan sesuatu permasalahan untuk diteliti, yaitu : Pertimbangan yang bersifat pribadi dan pertimbangan yang berkenaan dengan permasalahan itu sendiri, Zainudin Arif (1982 : 11). Pertimbangan yang bersifat pribadi berhubungan dengan tertarik tidaknya seseorang yang akan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Apakah peneliti mempunyai kemampuan untuk melakukan penelitian, dan juga apakah ada manfaat yang akan diperoleh peneliti melalui penelitiannya itu. Pertimbangan yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti; Apakah penelitian tersebut mengandung nilai praktis serta memberikan manfaat terhadap pemecahan masalah. Sumbangan apa yang mampu disumbangkan guna memperkaya literatur(kerangka teoritis) dalam pemecahan permasalahan. Apakah penelitian tersebut memberikan sumbangan pemecahan masalah secara umum(generalization) pada bidang yang sama, ataupun penelitian tersebut dapat memberikan input

atau masukan bagi pengembangan masyarakat pedesaan pada umumnya.

Penelitian ini dilakukan berkaitan guna memperoleh informasi atau data yang obyektif tentang pengaruh industri berskala besar terhadap pendidikan luar sekolah di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe.

Dengan perolehan informasi tersebut diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai dasar bahan monitoring terhadap keseimbangan pencapaian pembangunan fisik dan pembangunan pendidikan bagi masyarakat. Khususnya diharapkan akan berguna bagi pemerintah daerah di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe mengenai perkembangan pendidikan luar sekolah yang berada di wilayahnya dan juga bagi industri PT. Arun, PT. Asean Aceh Fertilizer dan PT. Pupuk Iskandar Muda di dalam memonitor kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan pendidikan luar sekolah sebagai sarana pencapaian sasaran program Community Development industri yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe.

Selanjutnya juga diharapkan akan berguna bagi peningkatan dan pertumbuhan pendidikan luar sekolah di daerah tersebut dan kalau mungkin dapat berguna bagi peningkatan dan pertumbuhan pendidikan luar sekolah di daerah-daerah lain di wilayah Indonesia yang mempunyai permasalahan yang serupa.

E. Difinisi Operasional

Dalam penelitian ini dirasa perlu untuk menetapkan definisi operasional atau penjelasan istilah-istilah yang berulang-ulang dipakai agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, khususnya istilah-istilah yang dicantumkan pada judul tesis ini dan beberapa istilah lainnya yang mempunyai kaitan langsung dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Dampak dimaksudkan adalah pengaruh positif maupun negatif dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengaruh, daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda dan sebagainya) yang berkuasa atau yang berkekuatan (gaib dan sebagainya), Purwadarminta (1984 : 731). Pengaruh yang dimaksudkan disini adalah pengaruh terhadap tumbuhnya dan peningkatan kegiatan pendidikan luar sekolah di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe.
2. Industri besar, industri diartikan dalam Ensiklopedi Indonesia No. 3 (1982 : 1442), yaitu :

Bahagian dari proses produksi, yang tidak secara langsung mengambil atau mendapatkan barang atau bahan dari alam, akan tetapi mengerjakan bahan dasar atau bahan baku secara mekanis maupun kimiawi sehingga menjadikannya lebih berharga untuk dipakai manusia.

Industri besar yang dimaksudkan adalah, suatu kegiatan atau usaha untuk mengerjakan bahan dasar atau bahan baku secara mekanis maupun kimiawi yang menggunakan teknologi canggih, penanganannya memerlukan tenaga-tenaga skill

serta padat modal. Sedangkan industri besar yang dimaksud adalah, industri PT. Arun LNG (PTA), PT. Asean Aceh Fertilizer (PT.AAF) dan PT.Pupuk Iskandar Muda (PT.PIM), yang berlokasi di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

3. Pendidikan Luar Sekolah ialah suatu kegiatan pendidikan yang terorganisir dan sistimatis, berlangsung di luar kerangka pendidikan persekolahan (formal).

a. Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat (PLSM/Diklusemas), seperti kursus-kursus dan dayah-dayah (pesantren) yang berada di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe.

b. Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dibiayai atau dikelola industri(PLSI), pendidikan dan latihan (Diklat) yang diadakan industri-industri dengan dana community development dalam rangka membantu masyarakat lingkungan di wilayah Kota Administratif Lhokseumawe.

4. Wilayah Kota Administratif Lhokseumawe, ialah suatu wilayah yang terletak di sebelah utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh, termasuk dalam daerah tingkat II Kabupaten Aceh Utara, dengan ketetapan peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PP.NO. 32/1986, tanggal 14 Agustus 1986, Kompas (2-9-1987 :XI), yang terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Banda Sakti (7 Kelurahan dan 5 Desa);
- b. Kecamatan Muara Dua (1 Kelurahan dan 27 Desa);
- c. Kecamatan Blang Mangat(- Kelurahan dan 22 Desa);
- d. Kecamatan Dewantara (- Kelurahan dan 15 Desa);
- e. Kecamatan Muara Batu (- Kelurahan dan 24 Desa);

Luas wilayah Kota Administratif Lhokseumawe adalah melebihi 60 km persegi. Jumlah penduduknya kurang lebih 200.000 jiwa.

F. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan industri berskala besar di suatu daerah akan memberikan pengaruh tidak langsung maupun langsung pada lembaga-lembaga lain di daerah tersebut.
2. Meningkatnya kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat akan diikuti oleh meningkatnya pendidikan masyarakat tersebut, sebaliknya meningkatnya pendidikan suatu masyarakat akan diikuti pula oleh meningkatnya kehidupan sosial ekonomi mereka.
3. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat, yang dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat.

Oleh karena itu pendidikan adalah merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian semua umat manusia di atas dunia ini tidak dapat menghindar ataupun melepaskan dirinya dari proses belajar.

4. Pendidikan Luar Sekolah dapat mengandalkan aneka ragam sponsor dan sumber dana atau dukungan, dapat diadakan dengan aneka corak dan bentuk, dapat menggunakan aneka ragam tenaga pengajar dan metodik pengajaran, dapat diselenggarakan pada sembarang waktu di sembarang tempat dan untuk setiap jangka-masa.

Pendidikan Luar Sekolah adalah merupakan salah satu wadah pendidikan yang elastis yang dapat digunakan orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk membantu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat untuk memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial ekonomi mereka.

